



ABDUL HARIS FATGEHIPON

Presiden Soekarno dan Pembentukan Tidore sebagai Ibu Kota Provinsi Perjuangan Irian Barat

RESUME: Tidore memiliki peran yang panjang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menyatukan kita semua, perjuangan para pendiri bangsa, salah satunya adalah Presiden Soekarno, dalam memprakarsai pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat pada tanggal 17 Agustus 1957. Metode dalam penelitian ini adalah kajian sejarah dan historiografi, dengan melakukan penelitian lapangan terhadap objek-objek sejarah di Tidore, serta melakukan wawancara dengan para saksi dan pelaku sejarah. Penulis juga melakukan penelitian kearsipan di ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), Jakarta. Terbentuknya ibu kota provinsi Perjuangan Irian Barat dengan ibu kota di Soa Sio, Tidore, memiliki makna dan simbol sejarah yang sangat dalam. Nilai dari peristiwa sejarah tersebut harus direkonstruksi semaksimal mungkin. Presiden Soekarno mengingatkan memori sejarah bangsa Indonesia dan dunia internasional bahwa Irian Barat (Papua sekarang) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Tidore juga menjadi rantai perjuangan yang menghubungkan antara Irian Barat dengan Indonesia.

KATA KUNCI: Soekarno; Soa Sio Tidore; Irian Barat.

ABSTRACT: "President Sukarno and the Tidore Formation as the Capital of West Irian Province of Struggle". Tidore has a long role in the history of the Indonesia nation's struggle. The purpose of this paper is to tie us all together, the struggle of the nation's founders, one of them is President Sukarno in initiating the formation of the Province of West Irian Struggle on 17 August 1957. The method in this research is historical study and historiography, by conducting field research on historical objects in Tidore, and conducting interviews with historical witnesses and actors. The author also conducts archival research at the ANRI (National Archives of the Republic of Indonesia), Jakarta. The formation of the capital city of the Struggle Province in West Irian with a capital city in Soa Sio, Tidore, has a very deep historical meaning and symbol. The value of these historical events must be reconstructed as long as possible. President Soekarno reminded the historical memory of the Indonesian nation and the international community that West Irian (now Papua) is an inseparable part of Indonesia. Tidore is a chain of struggle that connects West Irian and Indonesia.

KEY WORD: Soekarno; Soa Sio Tidore; West Irian.

Mengenai Penulis: Dr. Abdul Haris Fatgehipon adalah Dosen di Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS UNJ (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta), Gedung K, Kampus UNJ, Jalan Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia. Alamat emel: perahanan@yahoo.com

Cara Mengutip: Fatgehipon, Abdul Haris. (2022). "Presiden Soekarno dan Pembentukan Tidore sebagai Ibu Kota Provinsi Perjuangan Irian Barat" dalam *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Volume 15(2), November, hlm.49-58. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Minda Masagi Suci dan ASPENSI (Asosiasi Sejarawan dan Pendidik Sejarah Internasional), ISSN 1979-0112 (*print*) dan ISSN 2622-6855 (*online*).

Riwayat Artikel: Diterima (19 September 2022); Direvisi (28 Oktober 2022); and Diterbitkan (30 November 2022).

PENDAHULUAN

Dalam penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia, pada tanggal 27 Desember 1949, pihak Belanda menunda penyerahan wilayah Irian Barat. Belanda memiliki harapan yang besar agar dapat tetap menguasai wilayah Irian Barat tersebut (Susetyo, 2018; Barink, 2020; Wicaksono, 2022).

Ada beberapa alasan mengapa Belanda tetap ingin mempertahankan wilayah Irian Barat. Belanda, sejak awal abad ke-20 Masehi, sudah melakukan berbagai penelitian mengenai potensi hasil bumi, yang dimiliki oleh Irian Barat (Koentjaraningrat & Bachtiar, 1963:68).

Belanda juga mengalami permasalahan kependudukan, dimana jumlah keturunan Indo-Belanda sangat banyak di Indonesia. Mereka merupakan orang Belanda campuran, atau Belanda Eropa, yang lahir dan besar di Hindia Belanda (Indonesia) dan sudah tidak mengenal negeri leluhurnya, yakni Belanda. Mereka enggan untuk balik ke negeri Belanda. Belanda, dengan demikian, hendak menjadikan Irian Barat sebagai “negeri orang kulit putih dan Indo-Belanda”, sebagaimana Australia dan Selandia Baru, yang menjadi “negeri kulit putih” (Koentjaraningrat & Bachtiar, 1963; Hardjono, 1992; Susetyo, 2018).

Negara-negara Sekutu Belanda, seperti Australia, mendukung Irian Barat tetap dikuasai oleh Belanda, yang sama-sama berkulit putih, dibandingkan dengan apabila dikuasai oleh Indonesia. Media Australia selalu tidak menyetujui pendekatan sejarah dalam perebutan dan perjuangan Irian Barat oleh Indonesia. Australia tidak mengakui Irian Barat merupakan bagian dari Kesultanan Tidore di Maluku (Hardjono, 1992; Susetyo, 2018; Barink, 2020).

Papua Nugini dan Australia sangat takut terhadap sikap politik yang agresif dari Indonesia atas permasalahan Irian Barat. Dalam konteks ini, Herbert Feith (1962), dan sarjana lainnya, meyakinkan Australia bahwa yang dilakukan oleh pihak Indonesia hanya untuk mengkonsolidasikan posisi Irian Barat, dan bukan untuk memperluas wilayah kekuasaannya (Feith, 1962; Hardjono, 1992; Purdey, 2014:258).

Dengan merujuk kepada pendekatan sejarah, yang disampaikan oleh Muhammad Yamin (1950), dalam sidang BPUKI (Badan Persiapan dan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1945, sebahagian besar dari pulau Irian (Papua sekarang) adalah masuk kedalam tanah dan adat Kerajaan Tidore di Maluku, sehingga dengan sendirinya daerah itu benar-benar daerah Indonesia. Presiden Soekarno, bersama para pemimpin bangsa lainnya, seperti Mohamad Hatta dan Ali Sostroamijoyo, memperjuangkan pengembalian wilayah

Irian Barat kedalam wilayah Republik Indonesia (Yamin, 1950; Bahar & Hudawati eds., 1998:158; Kusuma & Elson, 2011).

Tulisan ini membahas hasil penelitian tentang keputusan Presiden Soekarno dalam membentuk Soa-Sio di Tidore sebagai ibu kota Provinsi Perjuangan Irian Barat, pada tanggal 17 Agustus 1957. Pada tanggal 17 Agustus 1956, setahun sebelumnya, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat, dengan ibu kota di Soa-Sio, dan Zainal Abidin Syah ditunjuk sebagai Gubernur Irian Barat. Kebijakan pemerintah itu mendapatkan sambutan dan dukungan spontan dari masyarakat, sehingga aksi-aksi anti Belanda semakin meningkat (Fatgehipon, 2021; Pusjarah Mabes TNI, 2000:112).

Pembentukan Tidore sebagai Ibu Kota Provinsi Perjuangan Irian Barat merupakan bentuk dari diplomasi sejarah, yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mengingatkan kepada bangsa Indonesia dan dunia Internasional bahwa Irian Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia (Fatgehipon, 2021).

Tulisan ini, dengan menggunakan metode Sejarah dan Historografi, berusaha mendapatkan data-data lewat wawancara, yang dilakukan dengan kalangan Tokoh Adat, Kesultanan Tidore, pelaku sejarah, dan para sejarawan. Peneliti juga melakukan studi literatur dan kearsipan, yang terkait dengan kebijakan pemerintah Soekarno, kesultanan Tidore, dan perjuangan perebutan Irian Barat. Wawancara dilakukan di Tidore, Maluku Utara, pada bulan Desember 2019 hingga Januari 2021. Penelitian kearsipan dilakukan pada ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) di Jakarta, pada bulan Februari 2020 (Zed, 2008; Sjamsuddin, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegagalan Belanda dalam diplomasi internasional menyebabkan Belanda tertekan dan terpaksa mengikuti keinginan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menyerakan kekuasaan atas wilayah Hindia Belanda kepada pemerintah Indonesia. Dalam penyerahan kedaulatan wilayah Hindia Belanda kepada pemerintah Indonesia, Belanda tetap mempertahankan penyerahan wilayah Irian Barat atau Papua sekarang.

Penyerahan wilayah Indonesia, pada tanggal 27 Desember 1949, tanpa wilayah Irian Barat. Negosiator Indonesia dalam perundingan KMB (Konferensi Meja Bundar), Mohamad Hatta, menggunakan strategi menerima keputusan Belanda dalam KMB, sebab bagi mereka yang paling terpenting adalah Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia (Noer, 1990).

Hasil KMB banyak mendapat protes dari dalam negeri, terutama soal kewajiban Indonesia dalam pembayaran hutang pemerintah Belanda, masalah penggabungan KNIL (*Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger* atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda) kedalam RIS (Republik Indonesia Serikat), dan masalah Irian Barat. Masyarakat di Indonesia merasa bahwa hasil perundingan KMB belum mengantarkan Indonesia kepada kemerdekaan yang sesungguhnya, sebab wilayah Irian Barat masih dikuasai oleh pemerintah Belanda (Juliarni & Zed, 2019).

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta, dengan berbagai cara, menggelolarkan semangat perjuangan untuk pengembalian Irian Barat. Dalam diplomasi luar negeri, selepas KMB, Belanda mengulur-ulur waktu pembahasan tentang pengembalian wilayah Irian Barat. Muncul gejolak politik dalam negeri dari berbagai unsur, yang meminta untuk memperjuangkan pengembalian wilayah Irian Barat (Legge, 1985; Noer, 1990).

Soekarno kemudian merumuskan pengembalian wilayah Irian Barat lewat beberapa strategi, yaitu pendekatan diplomasi luar negeri, memperkuat militer Indonesia, melakukan nasionalisasi perusahaan asing (Belanda), dan strategi diplomasi budaya dan sejarah. Dalam strategi militer, Presiden Soekarno bernegosiasi dengan Uni Sovyet (Russia sekarang) dan berbagai negara untuk dapat menjual ALUTSISTA (Alat Utama Sistem Persenjataan)-nya ke Indonesia. Dalam perebutan Irian Barat, Presiden Soekarno mendatangkan kekuatan ALUTSISTA dari Russia, berupa kapal *destroyer* dan *fregat*, serta kapal *fregat* dan *korvet* buatan Italia. Kapal PRI (Perang Republik Indonesia) Irian adalah kapal perang buatan Russia yang besar dan digunakan dalam perjuangan perebutan Irian Barat (Suharta, 2015:401).

Dalam membangun strategi diplomasi budaya dan sejarah, pada tanggal 18 Agustus 1954, Presiden Soekarno melakukan kunjungan bersama Ibu Negara, Fatmawati, ke Tidore di Maluku Utara, yang disambut oleh rakyat Tidore dengan meriah. Pada tanggal 17 Agustus 1957, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tidore sebagai Ibu Kota Provinsi Perjuangan Irian Barat. Penetapan Tidore sebagai ibu kota Perjuangan Irian Barat ini merupakan kecerdasan Soekarno dalam melakukan strategi diplomasi budaya dan sejarah (Legge, 1985; Fatgehipon, 2021).

Kesultanan Tidore, sebagai pusat kekuasaan Islam yang pengaruhnya meliputi kepulauan Maluku dan Irian Barat (Papua sekarang), Kota Tidore berkembang menjadi pusat kekuasaan Kesultanan Tidore sejak abad ke-17 Masehi. Parameter kota kesultanan ditunjukkan oleh jejak-jejak arkeologi, dengan adanya *kedaton* (Handoko & Mansyur, 2018:20-

21; Fatgehipon, 2021).

Dari berbagai kearsipan kolonial Belanda banyak berisikan perjanjian kerjasama antara Tidore dan Belanda mengenai Irian Barat (Papua). Belanda mengakui Irian Barat merupakan wilayah kekuasaan dari kesultanan Tidore. Pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat oleh Presiden Soekarno, dengan demikian, untuk mengingatkan memori kolektif sejarah bangsa Indonesia dan dunia internasional bahwa Irian Barat dan Tidore merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Irian Barat merupakan wilayah yang bertuan dari kesultanan Nusantara, yang telah menyatakan sikap untuk bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (Legge, 1985; Fatgehipon, 2021).

Kenapa Ibu Kota Provinsi Perjuangan Irian Barat bukan di Ternate, Jailolo, Halmahera, atau Ambon, tetapi di Soa-Sio, Tidore? Ini disebabkan penentuan Ibu Kota Provinsi Perjuangan berdasarkan pendekatan politis, mengingat dalam sejarahnya, Irian Barat pernah menjadi daerah kekuasaan Kesultanan Tidore. Tidore merupakan salah satu kerajaan besar di jazirah Maluku Utara, yang mengembangkan kekuasaan, terutama di wilayah selatan pulau Halmahera dan kawasan Papua bagian Barat (Herlina, 1985:16; Idham, 2011:84; Fatgehipon, 2021).

Kesultanan Tidore, dan para Sultan-nya, memilih untuk bekonfrontasi dengan Belanda. Ini menyebabkan selepas kemerdekaan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Tidore tidak semaju daerah lain di Indonesia. Tidore, sebagai ibu kota dari kesultanan maritim, sangat jauh tertinggal dan terbelakang. Keputusan Presiden Soekarno dalam pembentukan Ibukota Provinsi Perjuangan Irian Barat di Tidore membawa manfaat positif, dimana pemerintah mulai membangun sarana, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan (Legge, 1985; Fatgehipon, 2021).

Dalam pembangunan layanan kesehatan, Kementerian Kesehatan mendatangkan dokter dan tenaga kesehatan untuk mengabdikan di Ibu Kota Provinsi Perjuangan Irian Barat, di Soa-Sio, Tidore. Sebelumnya, untuk mendapatkan layanan kesehatan, masyarakat Tidore harus menyebarkan laut ke Pulau Ternate. Pengobatan kesehatan di Tidore lebih banyak menggunakan layanan non-medis obatan-obatan tradisional oleh para dukun. Praktek pengobatan tradisional sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagaimana masyarakat di Tidore. Pengobatan patah tulang tradisional di Desa Gurabati, Tidore, misalnya, terkenal di Maluku Utara, yakni ilmu pengobatan yang didapat secara turun-temurun bergenerasi-generasi sejak era kesultanan; dan ini merupakan nilai-nilai kearifan lokal yang masih

tetap tepelihara (Idham, 2011; Fatgehipon, 2021).

Jalannya pemerintahan Provinsi Perjuangan Irian Barat menghadapi berbagai tantangan. Selain masalah keterbatasan infrastruktur, pemerintah Provinsi Perjuangan Irian Barat juga berhadapan dengan gejolak politik, akibat pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) pada 1950-1962; serta PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera dan PERMESTA (Perjuangan Semesta Alam) di Sulawesi pada 1958-1962 (Harvey, 1984; Chauvel, 1990; Leirissa, 1997).

Pemberontakan RMS dan PRRI-PERMESTA menyebabkan hubungan komunikasi dan transportasi diantara Tidore (Maluku Utara) dan Ambon (Maluku Selatan) terputus; juga hubungan antara Jakarta di Jawa dan wilayah Maluku Utara menjadi terhambat. Dampak dari pemberontakan RMS dirasakan sampai ke Maluku Utara, sebab TNI (Tentara Nasional Indonesia) melakukan blokade laut untuk membatasi ruang-gerak RMS ke berbagai pulau di Maluku. RMS berhasil memperluas pemberontakannya dari Ambon ke Seram, dan Pulau Buru, dimana pulau yang terakhir itu dekat dengan wilayah pulau-pulau di Maluku Utara (Harvey, 1984; Chauvel, 1990; Leirissa, 1997).

Kawasan Maluku Utara tidak ikut dalam pemberontakan RMS, meski sempat diajak bergabung oleh Dr. C.R.S. Soumokil. Beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RMS, Dr. C.R.S. Soumokil, dengan menaiki pesawat Catalina, tiba di Ternate, dan berlabuh di Jembatan Residen. Dr. C.R.S. Soumokil kemudian menemui Sultan Ternate, Jabir Syah, sebagai Residen Maluku Utara, untuk meminta bergabung dengan RMS. Dengan tegas, Sultan Jabir Syah menolak untuk bergabung dengan RMS (Chauvel, 1990; Amal, 2002:463).

Pemberontakan PRRI-PERMESTA juga menyebar sampai ke wilayah Maluku dan Maluku Utara. Rakyat di Maluku Utara, terutama para pelajar asal Maluku Utara yang sedang kuliah di Manado, Sulawesi Utara, banyak yang bersimpati dengan perjuangan PRRI-PERMESTA dan ikut bergabung didalamnya. Wilayah Maluku Utara menjadi ajang pertempuran antara pemberontak PRRI-PERMESTA dan TNI (Harvey, 1984; Chauvel, 1990; Leirissa, 1997).

Dengan pertimbangan keamanan, Sultan Zainal Abidin Syah, sebagai Gubernur Provinsi Perjuangan Irian Barat, memilih untuk mengungsi ke wilayah Halmahera. Dengan dikawal oleh pasukan BRIMOB (*Brigade Mobile*), Sultan bersama keluarga berpindah-pindah kampung di Halmahera untuk menghindari teror dari pasukan PRRI-PERMESTA (Leirissa, 1997; Fatgehipon, 2021).

Gerakan PRRI-PERMESTA memilih bergabung dengan pasukan TNI, saat menghadapi konfrontasi dengan Belanda dalam masalah

Irian Barat pada 1961-1963; dan dengan Malaysia dalam masalah isu NEKOLIM (Neo Kolonialisme dan Imperialisme) pada 1963-1966. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya gerakan yang dilakukan oleh PRRI-PERMESTA adalah bukan “pemberontakan”, karena rasa cinta mereka terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Di saat negara menghadapi musuh dari luar, pemimpin PRRI-PERMESTA untuk wilayah kepulauan Maluku, dibawah pimpinan Jonkhy Kumontoy, pada tahun 1961, misalnya, justru ikut bersama TNI dalam operasi TRIKORA (Tri/Tiga Komando Rakyat) untuk pembebasan Irian Barat (Leirissa, 1997:203).

Dengan infrastruktur yang terbatas, pemerintah Provinsi Perjuangan Irian Barat dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tantangan. Sultan Zainal Abidin Syah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Perjuangan Irian Barat dari tahun 1956-1961, kemudian dilanjutkan oleh Kolonel AL (Angkatan Laut) Pamoedji (Fatgehipon, 2021).

Menjelang rencana konfrontasi militer dengan pemerintahan Belanda di Irian Barat, kekuatan armada laut dari TNI-AL (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut) banyak bersandar di pelabuhan Soa-Sio, Tidore, yang merupakan Ibu Kota Provinsi Perjuangan Irian Barat. Kapal-kapal perang milik TNI-AL berlabuh di pelabuhan Goto, Tidore, untuk koordinasi persiapan operasi TRIKORA. Para Kapten kapal legendaris Indonesia, seperti Mayor John Lie dan Laksamana Madya Yosaphat Sudarso, pernah menyandarkan kapalnya di pelabuhan Goto, Tidore.¹

Dari pelabuhan laut Goto, Tidore pula, Srikandi Wanita Indonesia, yang dijuluki *Pending Emas*, yakni Sitti Rachmah Herlina (1985), melakukan misi infiltrasi ke Irian Barat. Pelabuhan Goto di Soa-Sio, Tidore, dengan demikian, menjadi lokasi pengiriman pasukan TNI, Sukarelawan, dan eks-Pasukan PRRI-PERMESTA ke Irian Barat (Herlina, 1985; Leirissa, 1997; Fatgehipon, 2021).²

Berbagai peninggalan sejarah Provinsi Perjuangan Irian Barat di Tidore masih tersisa, meski jauh dari perawatan. Misalnya, Rumah Dinas Gubernur Provinsi Perjuangan Irian Barat, yang tidak terawat; Kantor Gubernur; dan Stasiun RRI (Radio Republik Indonesia) Perjuangan Irian Barat. Objek peninggalan sejarah dari Provinsi Perjuangan Irian Barat yang terdapat di Soa-Sio, Tidore, semestinya dirawat dan dikelola menjadi destinasi wisata sejarah, bukan saja oleh

¹Lihat juga, misalnya, Wawancara dengan Ir. Arifin Raimadoya, M.Sc., Putra Gubernur Provinsi Perjuangan Irian Barat, Zainal Abidin Syah, dan sekarang menjabat sebagai Dosen IPB (Institut Pertanian Bogor), di Bogor, Jawa Barat, Indonesia, pada tanggal 2 Desember 2019.

²Lihat juga, misalnya, Wawancara dengan Amin Faruk, S.I.P., Sekretaris Kesultanan Tidore, di Tidore, Maluku Utara, Indonesia, pada tanggal 12 Februari 2002.

masyarakat di Maluku Utara, tetapi juga oleh masyarakat di Indonesia untuk menjadi pengingat dan pembelajaran sejarah yang panjang dalam perjuangan pembebasan wilayah Irian Barat dari tangan penjajahan Belanda (Fatgehipon, 2021).³

KESIMPULAN

Perjuangan dalam perebutan Irian Barat menggunakan beberapa pendekatan, diplomasi internasional, militer, serta diplomasi sejarah dan budaya. Pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat, yang beribukota di Soa-Sio, Tidore, Maluku Utara, merupakan kecerdikan dari Presiden Soekarno dalam melakukan diplomasi budaya dan sejarah.

Presiden Soekarno mengingatkan memori sejarah bangsa Indonesia dan dunia internasional bahwa Irian Barat (Papua sekarang) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Tidore menjadi rantai perjuangan yang menghubungkan antara Irian Barat dengan Indonesia.⁴

Referensi

- Amal, M. Adnan. (2002). *Kepulauan Rempah-rempah*. Jakarta: KPG [Kepustakaan Populer Gramedia].
- Bahar, Saafroedin & Nannie Hudawati [eds]. (1998). *Risalah Sidang BPUPKI*. Jakarta: Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia].
- Barink, R. (2020). *Caught between the Netherlands and the Republic: The Position of the Federal Consultative Assembly – ‘Bij eenkomst voor Federaal Overleg’ (BFO)– during the Dutch-Indonesian Conflict, 1945–1950*. Leiden: Leiden University.
- Chauvel, R. (1990). *Nationalist, Soldiers, and Separatist: Ambonese Island from Colonialism and Revolt, 1880-1950*. Leiden: KITLV Press.
- Fatgehipon, Abdul Haris. (2021). “The Exodus of KNIL Soldiers from Maluku to the Netherlands in 1950s” in *TAWARIKH: Journal of Historical Studies*, Volume 12(2), April, pp.195-206. Available online also at: <https://journals.mindamas.com/index.php/tawarikh/article/view/1437> [accessed in Jakarta, Indonesia: 2 March 2022].
- Feith, Herbert. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Handoko, Wuri & Syahrudin Mansyur. (2018). “Kesultanan Tidore: Bukti Arkeologi sebagai Pusat Kekuasaan Islam dan Pengaruhnya di Wilayah Periferi” dalam *Arkeologi Kemendikbud*, Vol.38, No.1.

³Lihat juga, contohnya, Wawancara dengan Sarifudin Ajam, M.Sc., Tokoh Masyarakat Tidore dan sekarang sebagai Dosen UNKHAIR (Universitas Khairun), di Ternate, Maluku Utara, Indonesia, pada tanggal 18 Januari 2021.

⁴**Pernyataan:** Saya, yang bertanda-tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa artikel ini adalah karya akademik saya sendiri. Ianya bukan hasil plagiat, mengingat sumber-sumber yang saya kutip dan rujuk, jelas tercantum dalam Daftar Pustaka atau Referensi. Artikel ini juga belum pernah saya kirim ke jurnal ilmiah lain untuk direviu dan diterbitkan. Saya tidak akan menarik-balik artikel ini dari jurnal *SOSIOHUMANIKA*, yang diterbitkan oleh Minda Masagi Suci dan ASPENSI (Asosiasi Sejarawan dan Pendidik Sejarah Internasional) di Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

- Hardjono, Ratih. (1992). *Suku Putihnya Asia: Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harvey, Barbara Sillars. (1984). *PERMESTA: Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: Grafiti Pers, Terjemahan.
- Herlina, Sitti Rachmah. (1985). *Pending Emas: Bergerilya di Belantara Irian*. Jakarta: Gunung Agung.
- Idham. (2011). "Naskah Klasik di Kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Uatar" dalam *Jurnal MANASA*, Vol.1, No.1, ISSN 2088-9631.
- Juliarni, Epa & Mestika Zed. (2019). "Sejarah Pemikiran Diplomatik: Konflik Indonesia-Belanda pada KMB dan Isu yang Belum terselesaikan" dalam *KRONOLOGI: Jurnal Mahasiswa Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, Vol.1, No.2, hlm.12-26.
- Koentjaraningrat & Harsja W. Bachtiar. (1963). *Penduduk Irian Barat*. Djakarta: Penerbit UI [Universitas Indonesia].
- Kusuma, A.B. & R.E. Elson. (2011). "A Note on the Sources for the 1945 Constitutional Debates in Indonesia" in *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Volume 167(2-3), pp.196-197.
- Legge, John D. (1985). *Sukarno: Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, Terjemahan.
- Leirissa, R.Z. (1997). *PRRI-PERMESTA: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Noer, Deliar. (1990). *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Purdey, Jemma. (2014). *Dari Wina ke Yogyakarta: Kisah Hidup Herb Feith*. Jakarta: Penerbit KPG [Kepustakaan Populer Gramedia].
- Pusjarah Mabes TNI [Pusat Sejarah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia]. (2000). *Sejarah TNI, Jilid III*. Jakarta: Mabes TNI.
- Sjamsuddin, Heliuss. (2015). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suharta, I Nyoman. (2015). *Arek Bumi Moro*. Jakarta: Bhuana Sastra.
- Susetyo, Berlian. (2018). "Strategi Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Irian Barat Tahun 1949-1962". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Lubuklinggau: Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan PIPS [Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial], STKIP PGRI [Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia].
- Wawancara dengan Amin Faruk, S.I.P., Sekretaris Kesultanan Tidore, di Tidore, Maluku Utara, Indonesia, pada tanggal 12 Februari 2002.
- Wawancara dengan Ir. Arifin Raimadoya, M.Sc., Putra Gubernur Provinsi Perjuangan Irian Barat, Zainal Abidin Syah, dan sekarang menjabat sebagai Dosen IPB (Institut Pertanian Bogor), di Bogor, Jawa Barat, Indonesia, pada tanggal 2 Desember 2019.
- Wawancara dengan Sarifudin Ajam, M.Sc., Tokoh Masyarakat Tidore dan sekarang sebagai Dosen UNKHAIR (Universitas Khairun), di Ternate, Maluku Utara, Indonesia, pada tanggal 18 Januari 2021.
- Wicaksono, Andri. (2022). "Sejarah Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda: Tinjauan Historis dalam Novel Indonesia" dalam *ARIF: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal*, Vol.2, No.1, hlm.16-33.
- Yamin, Muhammad. (1950). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Djakarta: Penerbitan Media Kita.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].



Presiden Soekarno dan Perjuangan Irian Barat
(Sumber: <https://www.lintasparlemen.com>, 17/10/2021)

Presiden Soekarno mengingatkan memori sejarah bangsa Indonesia dan dunia internasional bahwa Irian Barat (Papua sekarang) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Tidore menjadi rantai perjuangan yang menghubungkan antara Irian Barat dengan Indonesia.